

**AKUNTABILITAS KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA  
SRIBHAWONO KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ASTARI PUJA SERAYA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2017**

## ABSTRACT

### ACCOUNTABILITY OF THE VILLAGE CHIEF IN SRIBHAWONO VILLAGE SUB-DISTRICT PHYSICAL DEVELOPMENT OF BANDAR SRIBHAWONO REGENCY EAST SRIBHAWONO

By  
Astari Puja Seraya

The development has not been fully realized in the village of Sribhawono is a freeway that is urgently needed by the people of the village, but the Government is not prioritizing the most important needs. The Government of the village are also less involving communities in any development policy. Damage to the roads hinder access to local community economy.

The purpose of this research is to know the accountability of the village chief in the village of Sribhawono sub-district of physical development of Bandar Sribhawono Regency East Sribhawono. While the methods used in this research is qualitative, descriptive methods.

Accountability the village head Sribhawono not fully accountable because there are still many development non participatory, because only benefits a small group of society and not profitable. Although development intended benefit people, but much less understand it. the effect is Less evident precisely development conducted Sribahwono Village government apparatus do for development implemented less needed by the community due to Government Sribhawono less open to the community and only received a handful of opinions from some of the citizens, so that development only benefits certain parties only.

Key Words: Development, Akuntabilitas, Village Chief

## ABSTRAK

### AKUNTABILITAS KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA SRIBHAWONO KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh

Astari Puja Seraya

Pembangunan yang belum sepenuhnya terwujud di Desa Sribhawono merupakan akses jalan raya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, namun pemerintah desa tidak memprioritaskan kebutuhan yang paling penting. Pemerintah desa juga kurang melibatkan masyarakat dalam setiap kebijakan pembangunan yang dilakukan. Kerusakan jalan tersebut menghambat akses perekonomian masyarakat setempat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif kualitatif.

Akuntabilitas kepala Desa Sribhawono belum sepenuhnya akuntabel sebab masih banyak pembangunan non partisipatif, dikarenakan hanya menguntungkan segolongan kecil masyarakat dan tidak menguntungkan rakyat banyak. Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat, tetapi banyak yang kurang memahami maksud itu. efek yang terlihat jelas adalah Kurang tepatnya pembangunan yang dilakukan aparat pemerintah Desa Sribahwono lakukan, sebab pembangunan yang dilaksanakan kurang dibutuhkan oleh masyarakat dikarenakan Pemerintah Sribhawono kurang terbuka kepada masyarakat dan hanya menerima segelintir pendapat dari beberapa warga masyarakat, sehingga pembangunan hanya menguntungkan beberapa pihak tertentu saja.

Kata Kunci : Pembangunan, Akuntabilitas, Kepala Desa

**AKUNTABILITAS KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA  
SRIBHAWONO KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR**

**Oleh**

**ASTARI PUJA SERAYA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Skripsi : **AKUNTABILITAS KEPALA DESA DALAM  
PEMBANGUNAN FISIK DESA SRIBHAWONO  
KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nama Mahasiswa : **Astari Puja Seraya**

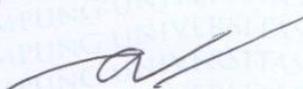
No. Pokok Mahasiswa : **1216021019**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

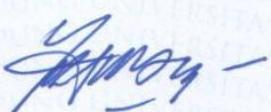
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



  
**Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.**  
NIP 19600729 199010 1 001

  
**Andri Marta, S.IP., M.IP.**  
NIK 231504 900304 1001

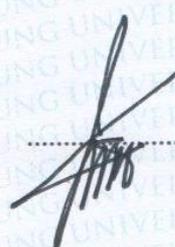
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

  
**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**  
NIP 19611218 198902 1 001

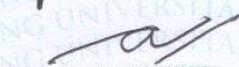
**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.**



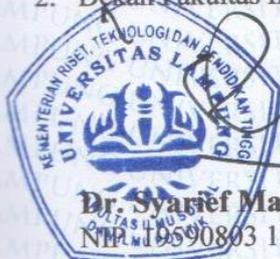
Sekretaris : **Andri Marta, S.IP., M.IP.**



Penguji : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dr. Syarif Makhya**  
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **30 Agustus 2017**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung. Oktober 2017



**Astari Puja Seraya**  
**NPM. 1216021019**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Astari Puja Seraya. Dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 01 September 1994. Penulis merupakan putri kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Drs. M. Saleh dan Ibu Siti Nurmala. Penulis menempuh pendidikan di TK PGRI Bandar Sribahwono pada tahun 2000, SDN 02 Sribhawono Lampung Timur pada tahun 2006, SMP AL-KAUTSAR Bandar Lampung 2009, SMA AL-Azhar 3 Bandar Lampung pada tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN Jalur Tertulis.

Semasa menjadi mahasiswa, penulis aktif sebagai anggota HMJ Ilmu Pemerintahan sebagai anggota periode kepengurusan 2013-2014. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sidoharjo Kec. Selagai Lingga, Kab. Lampung Tengah pada bulan Januari-Maret 2015.

# MOTTO

*Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri  
(QS Al-Ankabut: 6)*

*Dan bahwa Manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya  
(Q.S. An-Najm: 39)*

*Jangan pernah menunggu. Karena waktu akan terus berlari  
(Napoleon Hill)*

# **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsiku ini kepada.....

Motivasi, Semangat dan Tujuan Hidupku  
Ayahanda M. Saleh dan mama Siti Nurmala.  
Terima kasih untuk doa, kasih sayang, semua pengorbanan  
dan kesabaran, terima kasih untuk segala-galanya

Kakak ku tersayang  
Hakimi Yuda Seraya  
Terima kasih atas doa dan dukungannya

Sahabat dan teman-temanku yang terbaik  
Terima kasih untuk semua warna dan suka duka  
kebersamaannya

## SANWACANA

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena bantuan, berkat, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Akuntabilitas Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur**” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan. Tanpa adanya bantuan, dukungan, motivasi, dan semangat dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala berkat, rahmat, hidayah-Nya serta kesehatan dan petunjuk yang selalu Engkau berikan kepada kami. Maafkan hamba-Mu ini yang sering melakukan kesalahan dihadapan-Mu.
2. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, terimakasih untuk segala keiklasannya mendidik dan membantu mahasiswa selama ini.
4. Bapak Darmawan Purba S.IP, M.IP selaku Seketaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, terimakasih untuk segala keikhlasannya mendidik dan membantu mahasiswa selama ini.
5. Bapak Drs Denden Kurnia Drajat, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama, terimakasih atas kesabaran dan keiklasan dalam memberikan bimbingan, masukan dan saran, arahan, nasihat serta motivasi kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi secara baik dan maksimal.
6. Bapak Andri Marta S.IP, M.IP selaku Dosen Pembimbing Pembantu, terimakasih atas kesabaran dan keiklasan dalam memberikan bimbingan, masukan dan saran, arahan, nasihat serta motivasi kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi secara baik dan maksimal.
7. Bapak Drs Sigit Krisbintoro, M.IP selaku Dosen Pembahas, terima kasih atas masukan, pengarahan, saran dan kritik yang dapat membangun dan menjadi penyempurna untuk skripsi ini.
8. Ibu Dr Feni Rosalia,S.IP. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu proses akademik Penulis selama masa perkuliahan di jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung.

9. Kepada seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih setulus-tulusnya atas segala ilmu bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis.
10. Kedua orang tuaku, Ayahanda M. Saleh dan mama Siti Nurmala yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh ketulusan dan kasih sayang. Terima kasih untuk cinta yang tak terbatas apapun, kalianlah hidup dan tujuan hidupku dan kalianlah semangatku dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Abang tersayang Hakimi Yuda Seraya terima kasih telah memberikan motivasi dan mendoakan yang terbaik untuk penulis.
12. Sahabat yang sudah menjadi saudara Aulia Kartika S.I.P dan Dwi Anggraeni S.I.Kom terima kasih selalu menjadi penghibur selama 11 tahun persahabatan kita, terima kasih selalu menjadi sahabat yang siap siaga disaat apapun selalu menguatkan dan mengingatkan. Semoga kita bisa sama-sama terus yaa.
13. Terima kasih untuk Pebri Dwi Firnando S.IP yang selalu ada disaat dibutuhkan, dan yang tak pernah lelah memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat sejak SMA Priska Prilliana S.E, mbak Devi Retnowati S.Sos, Kenny Tampani S.E, Ulan Fitriani S.Pd, Emilia Septiani, Novi Yanti terima kasih telah menjadi bagian cerita indah sejak 7 tahun yang lalu. Semoga kita tetap terus bersama sampai akhir hayat.

15. Sahabat-sahabat yang selalu ada dan menemani dari awal masa kuliah, Suci Pebrina S.IP, Ulina Islami S.IP , Agustin Darma Putri S.IP, Meta Fitriani S.IP, Briptu Nora Hima, Rendi Noverdi , Juni Renaldu S.IP, Tri Umpu S.IP terima kasih selalu saling mensupport, terima kasih telah menemani semasa perkuliahan dengan penuh canda tawa, tanpa kalian masa kuliah kurang lengkap.Semoga kita bisa terus sama-sama yaa sukses buat kita semua! Amiin
16. Terima kasih teman sekostan yang telah menemani hingga 4 tahun terakhir, Della Eka Putri, Rica Arvenia S.Sos, Tiara Maharani, Melian Elsa Putri, Tina Nov, Riri Aifuni Putri kalian lah tetangga sekaligus keluarga terdekat selama 4 tahun terakhir, semoga kita selalu menjadi keluarga dimanapun kita berada. I will miss them .
17. Seluruh teman-teman Ilmu pemerintahan angkatan 2012 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas segala kebersamaannya.
18. Untuk teman-teman KKN Sidoharjo Rizka Amoy, mbak Elsa, Surya Mahendra, bang Darma, bang Harry dan bang Tedy terima kasih kalian telah menjadi bagian pengalaman dan berbagi kebersamaan selama 40 hari KKN di Desa Sidoharjo Lampung Tengah.
19. Terima kasih kepada Bapak Surajwo Selaku Kepala Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur beserta staf, Terima kasih sudah membantu dan mendukung untuk kelancaran skripsi ini.

Seluruh pihak-pihak lain yang telah banyak membantu dan mendoakan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua.

Bandar Lampung, Agustus 2017  
Penulis,

Astari Puja Seraya

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Akuntabilitas .....	7
1. Konsep Akuntabilitas .....	7
2. Prinsip-prinsip Akuntabilitas.....	9
3. Jenis-jenis Akuntabilitas.....	10
4. Dimensi Akuntabilitas .....	12
5. Model Akuntabilitas .....	13
B. Pemerintahan Desa .....	15
1. Pengertian Desa .....	15
2. Pemerintahan desa .....	17
C. Kepala Desa.....	18
1. Pengertian Kepala Desa.....	18
D. Konsep Pembangunan Desa .....	21
1. Pengertian Pembangunan Desa .....	21
2. Bentuk Pembangunan.....	23
3. Jenis Pembangunan .....	23
E. Kerangka Pikir.....	26
<b>III.METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian.....	28
B. Fokus Penelitian .....	29
C. Lokasi Penelitian .....	31
D. Jenis Data .....	32
E. Penentuan Informan .....	33
F. Teknik Pengumpulan Data .....	34
G. Teknik Pengolahan Data .....	37
H. Teknik Analisis Data .....	38
I. Uji Triangulasi Data .....	40
<b>IV. GAMBARAN UMUM</b>	
A. Sejarah Singkat Desa.....	43
B. Keadaan umum Wilayah Desa Sribhawono.....	46
1.Luas Wilayah Desa Sribhawono .....	46

2. Iklim .....	47
C. Keadaan Penduduk Desa Sribhawono .....	47
1. Keadaan Umum Penduduk.....	47
2. Keadaan Penduduk berdasarkan Pendidikan .....	47
3. Keadaan Penduduk berdasarkan Agama.....	48
4. Keadaan Penduduk berdasarkan Golongan Umur .....	48
5. Keadaan Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian.....	49
6. Sarana dan Prasarana Desa Sribhawono .....	50
D. Struktur Desa Sribhawono .....	51
E. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Sribhawono.....	52
F. Gambaran Umum Pembangunan Fisik Sribhawono .....	55
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	58
1. Aksesibilitas Kepemimpinan .....	58
2. kebebasan Informasi .....	64
3. Pelaksanaan didepan Publik.....	69
B. Pembahasan .....	77
1. Pembangunan Partisipatif .....	83
2. Pembangunan Non Partisipatif .....	92
<b>VI. PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	96
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Penelitian Terdahulu .....	4
Tabel 2 Batas Wilayah Desa Sribhawono .....	46
Tabel 3 Jumlah Pendidikan Penduduk Desa Sribhawono.....	47
Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	48
Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Umur .....	48
Tabel 6 Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	49
Tabel 7 Sarana dan Prasarana Desa Sribhawono .....	50
Tabel 8 Matriks Akuntabilitas Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa.....	95

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan Nasional akan terwujud apabila didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang baik dipusat maupun di daerah termasuk di tingkat desa dan kelurahan. Pembangunan yang dilaksanakan di desa atau tingkat kelurahan merupakan realisasi pembangunan Nasional. Untuk menunjang pembangunan di desa peran serta pemerintah serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan.

Pembangunan dapat diartikan sebagai proses perubahan yang terus menerus untuk keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Selain itu, pembangunan dapat diartikan sebagai pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jadi, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa

karena Kepala Desa yang memegang peran sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Kepala Desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, peran dan tanggung jawab.

Dalam hal akuntabilitas berarti bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin di Desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab di dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, juga Kepala Desa bertanggung jawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.

Pembangunan jalan desa yang sepenuhnya tidak berjalan dengan baik tidak hanya dirasakan oleh warga desa Sribhawono. Pembangunan yang terkesan asal-asalan juga terjadi di desa Rantauminyak Kecamatan Candipuro kabupaten Lampung Selatan pasalnya baru 2 bulan setelah pengerjaan jalan yang menghubungkan antara desa Rantauminyak dan desa Batuliman sudah mengelupas dan rusak parah. Hal ini membuat akses warga antar desa tersebut menjadi terhambat.

Pembangunan jalan Hotmix di desa Rantauminyak, kecamatan Candipuro terkesan asal-asalan. Pasalnya, baru dua bulan selesai dibangun jalan kabupaten yang menghubungkan Desa Batliman tersebut sudah rusak lagi. Aspal mulai menelupas jika dilalui kendaraan roda empat. (<http://www.radarlamsel.com/baru-dua-bulan-dibangun-jalan-rantauminyak-sudah-rusak/> diakses pada tanggal 27 oktober 2016 jam 20:30 WIB)

Efek dari pembangunan jalan tidak hanya dapat menghambat perekonomian warga setempat melainkan juga menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan yang melalui jalan yang rusak. Seperti halnya pada desa Tanjung Harapan Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur karena kondisi jalan yang rusak dan tidak kunjung diperbaiki berakibat hilangnya nyawa seorang warga yang melewati jalan tersebut dikarenakan jalan yang berlubang.

Parahnya kerusakan jalan raya di wilayah Kecamatan Sekampung Lampung Timur yang kini tidak juga di perbaiki, akhirnya kembali memakan korban jiwa. Seorang pengendara kendaraan roda dua dengan nomor polisi BE 4576 NB yang diketahui bernama Ridho Mela warga desa Tanjung Harapan Kecamatan Margatiga langsung meninggal di lokasi kejadian, akibat terjebak lubang di jalan raya Sumbergede Kecamatan Sekampung Lampung Timur. (<http://www.lampung1.com/2016/05/17/1-nyawa-melayang-akibat-jalan-raya-sekampung-lampung-timur-rusak-parah/> diakses pada 27 oktober 2016 jam 21.00)

Dari beberapa sumber yang telah penulis himpun dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan jalan dikarenakan sangat pentingnya perbaikan jalan agar tidak menghambat perekonomian serta membahayakan seluruh pengguna jalan.

Tabel. 1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Temuan Penelitian	Perbedaan
1	2	3	4
Adelita Pramadita	Akuntabilitas Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa Madukuro Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lmapung Utara	Permasalahan yang sering terjadi dalam pembangunan fisik desa adalah dalam hal partisipasi masyarakat dan dana untuk pembangunan desa.	penelitian ini lebih fokus membahas mengenai dana desa yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga kualitas pembangunan dari desa sribhawono tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah sribhawono.
Depi Astuti	Akuntabilitas Kepala Desa Banjar Masin dalam Pembangunan Fisik Tahun 2012-2013	Permasalahan yang terjadi dalam setiap perencanaan pembangunan tidak melibatkan masyarakat sehingga banyak pembangunan yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh masyarakat .	Pembangunan desa yang terhakng oleh dana pembanguann tidak sepenuhnya diberikan oleh pemerintah daerah sehingga menghambat proses pembangunan.

Sumber : Skripsi Akuntabilitas Kepala Desa dalam Pembangunan fisik Adelita Pramadita dan Depi Astuti

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis bahwa pembangunan fisik desa Sribhawono masih belum sepenuhnya baik.

Pembangunan jalan di desa Sribhawono masih 60% jalan yang layak pakai, dan sisanya masih berupa jalan rusak. Kerusakan jalan akan sangat menghambat akses masyarakat terutama perekonomian masyarakat terganggu terlebih lagi pada musim hujan.

Sulitnya melalui jalan tersebut akan menghambat kondisi perekonomian masyarakat setempat. Jarak tempuh juga menjadi bertambah karena banyak jalan yang berlubang dan sulit di lalui.

Sehingga pembangunan jalan di Desa Sribhawono sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jarak tempuh masyarakat tidak akan terganggu lagi apabila jalan yang berlubang sudah di perbaiki. Akan tetapi pembangunan yang ada masih belum sepenuhnya memperbaiki askes jalan yang dibutuhkan masyarakat. (observasi pada tanggal 13 februari 2016).

Pembangunan desa akan terlaksana dengan baik dengan bantuan dari aparat desa khususnya kapala desa. Kepala desa mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan desa agar pembangunan terlihat merata dan semua rancangan pembangunan terealisasi secara maksimal. Banyak dana yang masih belum terelisasi sesuai rencana. Dengan begitu ada keterlibatan pertanggung jawaban kepala desa untuk mengelola dana desa agar pembangunan fisik terealisasi sesuai rencana. Banyaknya pembangunan desa yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pembangunan yang terlaksana seharusnya didahulukan apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Serta kurangnya koordinasi pemerintah dengan masyrakat. Dimana aspirasi masyrakat sangat penting untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan sehingga pembangunan takan terwujud dengan tepat.

Berdasarkan dari permasalahan di atas, peneliti tertarik meneliti lebih mendalam dengan mengambil judul : **Akuntabilitas Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas maka rumusan masalah yang ada adalah “ **Bagaimana Akuntabilitas Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur?**”

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Praktis**

Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa dalam hal pembangunan fisik desa khususnya Kepala Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur kepada masyarakat.

### **2. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, pengetahuan dalam khasanah Ilmu Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas kepala desa dalam pembangunan fisik desa.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan tentang Akuntabilitas**

#### **1. Akuntabilitas**

Akuntabilitas biasanya hanya dikenal di negara yang memiliki konsep demokrasi yang menganggap rakyat sebagai faktor yang sangat penting. Akuntabilitas menerapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan pemerintahan harus di pertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu Negara.

Kumorotomo (2006:65) menyatakan akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat sesungguhnya.

Teguh afriyadi (2004:23) mendefinisikan akuntabilitas sebagai

“Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol

terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.”

Menurut walther R. Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktifitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (Nugroho. 2014:56).

Abdul halim (2012:20) akuntabilitas dalam arti luas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan akuntabilitas juga merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat. Akuntabilitas berkaitan erat dengan kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Selain itu akuntabilitas merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau bisa dikatakan good governance. Akuntabilitas juga dapat menjadi sarana tolak ukur untuk mengetahui suatu pemimpin bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab.

## **2. Prinsip-prinsip Akuntabilitas**

Budiardjo (2007: 81) menyatakan dalam penyelenggaraan akuntabilitas, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Bintaro tjokroamidjojo (2001:45) salah satu tokoh yang menjelaskan mengenai prinsip-prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut

- a. Prinsip lingkungan pertanggungjawaban dimana prinsip ini mengandung pengertian bahwa hal-hal yang dilaporkan harus proposional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
- b. Prinsip prioritas yakni bahwa laporan akuntabilitas kinerja harus berisi hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan

pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjut.

- c. Prinsip manfaat yaitu manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

Akuntabilitas yang dapat berjalan dengan baik apabila prinsip akuntabilitas dijalankan dan diterapkan di instansi pemerintahan.

### 3. Jenis-jenis Akuntabilitas

Menurut Saleh dan Iqbal (2008:45), Akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia meliputi akuntabilitas intern seseorang dan akuntabilitas ekstern seseorang.

- a. Akuntabilitas intern disebut juga akuntabilitas spritual. Tidak sekedar tidak ada pencurian dan sensibilitas lingkungan, tapi lebih dari itu seperti adanya perasaan malu berbuat melanggar ketentuan dan lain-lain. Ini sangat besar maknanya bila semua orang memiliki sensibilitas spritual seperti ini, alasan-alasan permisif seperti berbedanya kemampuan, tidak cukup waktu, tidak cukup sumber daya dan sebagainya merupakan cikal bakal adanya korupsi dan akuntabilitas menjadi seperti kaca mobil berembun alias kabur. Hendaknya kita berusaha keras menghindari keluhan-keluhan semacam itu bila kita ingin melaksanakan akuntabilitas dengan sungguh-sungguh.
- b. Akuntabilitas ekstern seseorang adalah akuntabilitas kepada lingkungan formal (atasan) maupun informal (masyarakat). Akuntabilitas ekstern lebih mudah diukur karena norma dan standarnya jelas. Ada atasan, ada pengawas, ada kawan sekerja yang membantu, ada masyarakat konsumen yang sesekali menyoroti dan memberikan oreksi serta saran perbaikan, kelompok mahasiswa yang sensitif terhadap penyimpangan-penyimpangan, dan ada pula lembaga masyarakat penyeimbang yang kepeduliannya sangat tinggi seperti *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

Polidano (2008:48) menawarkan kategorisasi baru yang disebutnya sebagai akuntabilitas langsung dan akuntabilitas tidak langsung. Akuntabilitas tidak langsung merujuk pada pertanggung jawaban kepada pihak eksternal seperti

masyarakat, konsumen, atau kelompok klien tertentu, sedangkan akuntabilitas langsung berkaitan dengan pertanggung jawaban vertikal melalui rantai komando tertentu.

Polidano (2008:78) lebih lanjut mengidentifikasi 3 elemen utama akuntabilitas, yaitu:

- a. Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum sebuah keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan otoritas untuk mengatur perilaku para birokrat dengan menundukkan mereka di bawah persyaratan prosedural tertentu serta mengharuskan adanya otorisasi sebelum langkah tertentu diambil. Tipikal akuntabilitas seperti ini secara tradisional dihubungkan dengan badan/lembaga pemerintah pusat (walaupun setiap departemen/lembaga dapat saja menyusun aturan atau standarnya masing-masing).
- b. Akuntabilitas peran, yang merujuk pada kemampuan seseorang pejabat untuk menjalankan peran kuncinnya, yaitu tugas yang harus dijalankan sebagai kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas yang langsung berkaitan dengan hasil sebagaimana diperjuangkan paradigma manajemen publik baru (new public management). Hal ini mungkin saja tergantung pada target kinerja formal yang berkaitan dengan gerakan manajemen publik baru.

- c. Peninjauan ulang secara retrospektif yang mengacu pada analisis operasi suatu departemen setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga eksternal seperti kantor audit, komite parlemen, ombudsmen, atau lembaga peradilan. Bisa juga termasuk badan-badan di luar negara seperti mediamassa dan kelompok penekan.

#### 4. Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas yang dilakukan pada sektor publik terdiri dari berbagai dimensi. Ellwood (2003:371) mengemukakan empat dimensi akuntabilitas publik berikut ini :

- a. Akuntabilitas kejujuran hukum  
Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan wewenang sedangkan akuntabilitas hukum berkaitan dengan adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lainnya yang dipersyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik.
- b. Akuntabilitas proses  
Akuntabilitas proses berkaitan dengan masalah prosedur yang digunakan dalam tugas . sudahkah memenuhi kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi? Akuntabilitas proses dimanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah. Akuntabilitas proses berkaitan dengan metode dan prosedur operasi dari suatu sistem yang mentransformasikan input menjadi output. Akuntabilitas proses menekankan bahwa beberapa tujuan mungkin tidak dapat diukur dan diganti secara langsung tetapi menyajikan bagaimana kegiatan diarahkan pada pencapaian tujuan.
- c. Akuntabilitas program  
Akuntabilitas program berkaitan dengan masalah pencapaian tujuan (efektivitas) dan mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Akuntabilitas program berkaitan dengan unit-unit dan birokrat secara individual yang melakukan aktivitas bersama untuk mencapai efektivitas program.
- d. Akuntabilitas kebijakan  
Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan masalah pertanggung jawaban pemerintah kepada publik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut penulis, akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok.

## **5. Model Akuntabilitas**

Coghill (2004:49) menyatakan bahwa model akuntabilitas dibedakan menjadi:

### **a. Model Tradisional yang dikembangkan**

- 1) Tidak hanya dari bawah ke atas, tetapi juga bersifat ke dalam (perorangan) dan keluar (masyarakat):
  - a) Upward
  - b) Inward
  - c) Outward
- 2) Perlu diciptakannya berbagai mekanisme dan sistem akuntabilitas seperti:
  - a) Pengembangan jaminan kebebasan mendapatkan informasi
  - b) Pembentukan berbagai lembaga independen yang bertujuan untuk mengontrol kinerja sektor publik seperti ombudsman dan lembaga peradilan yang kuat.

### **b. Model Stone**

Akuntabilitas dibagi dalam 5 kategori yaitu:

- 1) Kontrol dari parlemen (DPR)
- 2) Managerialism (P-D-C-A)
- 3) Pengadilan/lembaga semi peradilan;

- 4) Perwakilan masyarakat
- 5) Pasar (konsumen-pengusaha)

c. Sistem ini memberikan suatu kontrol *Check and Balance* yang sangat ketat sehingga kemungkinan untuk terjadinya tindakan-tindakan manipulatif akan sangat kecil, dari mulai saat proses pembuatan kebijakan hingga proses pelaksanaan kegiatan dapat termonitor dengan sangat teliti dan terorganisir.

Menurut Coghill (2004:49) dalam sistem yang seperti inilah akuntabilitas publik secara garis besar dijalankan, baik dalam pedelegasian kewenangan, pertanggung jawaban, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem akuntabilitas kompleks ini, akuntabilitas publik memiliki berbagai dimensi diantaranya adalah dimensi aksesibilitas, kebebasan informasi dan pelaksanaan di depan publik.

- 1) Aksesibilitas  
Mensyaratkan adanya hak masyarakat untuk mengakses segala bentuk informasi terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah terutama yang mempunyai dampak langsung terhadap kehidupan mereka. Bentuk informasinya mulai dari draft kebijakan, hasil-hasil sidang, berbagai dokumen pemerintahan, kecuali yang berhubungan dengan informasi yang bersifat pribadi. Pemerintah harus mampu memberikan akses kepada masyarakat agar dapat mengetahui segala bentuk informasi yang bertujuan untuk pembangunan publik.
- 2) Kebebasan informasi  
Dimensi akuntabilitas publik lainnya adalah kebebasan informasi atas segala bentuk dokumen yang ada dalam pemerintahan. Hal ini berkaitan sangat erat dengan dimensi aksesibilitas. Dengan dimensi ini tingkat akuntabilitas pemerintahan akan meningkat karena para pelaksana pemerintahan menyadari bahwa mereka dapat dimintai pertanggung jawaban langsung atas segala kebijakan dan program yang dilakukan. Masyarakat seharusnya dapat mengetahui seberapa jauh keadilan, kejujuran dan kebenaran (efisiensi dan efektifitas)

telah dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan dalam setiap hubungannya (*dealing*) dengan masyarakat.

3) Pelaksanaan di depan publik

Salah satu wujud transparansi dan keterbukaan adalah pelaksanaan pembuatan keputusan serta implementasinya sedapat mungkin dilaksanakan di depan publik

Berdasarkan model-model akuntabilitas di atas dalam penelitian ini maka model akuntabilitas yang digunakan oleh penulis adalah model akuntabilitas kompleks yaitu terdapat tiga dimensi akuntabilitas didalamnya yaitu aksesibilitas, kebebasan informasi dan pelaksanaan di depan publik. Ketiga dimensi tersebut sudah mencakup keseluruhan penelitian.

Selain itu menurut coghill (2004:45) dalam sistem Akuntabilitas Kompleks mempunyai kelebihan antara lain para pihak terkait satu dengan yang lain membentuk jaringan kerja dan saling memberikan kontribusi dan informasi. Model ini menekankan pada pola hubungan yang terjalin dalam suatu kerjasama dan dalam suatu sistem kerjasama semua pihak yang terkait dan pemeberian informasi untuk mencapai tujuan dari jaringan kerja ini.

## **B. Pemerintahan Desa**

### **1. Pengertian Desa**

Mendiskusikan kembali masalah desa sebagai unit pemerintahan mengantarkan pada pemahaman klasik tentang desa, sebagaimana anggapan para sosiolog yang menganggap desa sebagai daerah pedesaan (rural) maupun sebagai lingkungan masyarakat (community).

Para ahli sejarah memandang desa sebagai sumber kekuatan dan ketahanan desa dalam mempertahankan kemerdekaan (community power).

Bahkan menurut Ndara dalam Widjaja (2003: 3) desa dianggap sebagai sumber nilai luhur yang memiliki karakteristik seperti kegotongroyongan, musyawarah, mufakat dan kekeluargaan sehingga menimbulkan berbagai semboyan.

Desa menurut Widjaja dalam bukunya yang berjudul “otonomi desa” menyatakan bahwa : “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”. (2003:7).

Desa menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengartikan Desa sebagai berikut . “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pemerintah desa berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, sehingga Pemerintah Desa memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Sebab otonomi yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

## 2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa menurut Widjaja (2003:9) dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintahan Desa diartikan sebagai: “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati”.

Menurut saragih (2008:78) pengertian pemerintah desa terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri atas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dan perangkat desa. Penjelasan Pasal 95 Ayat 1 ini menyebutkan bahwa istilah Kepala Desa dapat Disesuaikan dengan kondisi sosial budaya desa setempat. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Calon terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan disahkan oleh Bupati. Syarat-syarat untuk mejadi calon Kepala Desa ada 13 syarat diantaranya berumur sekurang-kurangnya 25 tahun, memenuhi syarat lain yang sesuai dengan adat-istiadat yang diatur dalam Perda, dan lain-lain. Masa jabatan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) atau dua kali jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan (Pasal 96). Penjelasan Pasal 96 ini menyebutkan bahwa daerah Kabupaten dapat menetapkan masa jabatan Kepala Desa sesuai dengan sosial budaya setempat.

Namun demikian Undang-Undang ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan atau 2 (dua) kali masa jabatan. Pemerintah Desa yang diberi kepercayaan masyarakat tidak cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat banyak. Kedudukan dan bentuk organisasinya yang mendua (*ambivalen*) yaitu antara bentuk organisasi pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan, tidak adanya sumber pendapatan yang memadai, keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut isi rumah tangganya, keterbatasan kualitas personilnya, merupakan sebagian kendala yang menghambat kinerja Pemerintah Desa. Organisasi Pemerintah Desa semakin tidak mampu menjalankan fungsi dan peranannya dengan baik, maka terjadinya pertumbuhan dan perubahan sosial di desa yang relatif lambat, bahkan disana sini terjadi kemandegan, untuk melakukan perubahan sosial, masyarakat desa seringkali hanya menunggu uluran tangan dari luar desa, bukan hasil inisiatif yang datang dari dalam diri kesatuan masyarakat hukum itu sendiri. Situasi ini membuat masyarakat desa semakin tergantung pada pihak luar desa.

### **C. Kepala Desa**

#### 1). Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai alat pemerintah, alat pemerintah daerah dan alat pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Tugas Kepala Desa:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintah
- b. Pembangunan;
- c. Kemasyarakatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa:

“Kepala Desa adalah pemimpin desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.”

Menurut Widjaja (2003:32) menyatakan kepala desa adalah:

“Kepala desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal. Pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya.”

Kepala Desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD. Serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada masyarakat.

Kepala desa mempunyai wewenang dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa
- c. Menetapkan peraturan desa/desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa/desa mengenai ADD untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat desa

- f. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- g. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kepala Desa mempunyai kewajiban dalam melaksanakan tugas dan wewenang:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat dan desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;

- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat:
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Kepala Desa kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati atau walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Kepala desa menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama di bidang pembangunan dan kemasyarakatan, Kepala desa di bantu oleh lembaga-lembaga lain yang ada di desa.

#### **D. Konsep Pembangunan Desa**

##### **1. Pengertian Pembangunan Desa**

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa

pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Pembangunan daerah adalah seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Dalam hubungan ini pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan, prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah. Dengan demikian ciri pokok pembangunan daerah adalah:

- a. Meliputi seluruh aspek kehidupan
- b. Dilaksanakan secara terpadu
- c. Meningkatkan swadaya masyarakat

## 2. Ciri-ciri dan Prinsip Pembangunan Desa

Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri

husus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan desa itu sendiri. Menggerakkan partisipasi, prakaras dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu. Jadi di dalam merealisasikan pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek, jangan dari satu aspek saja, agar pembangunan desa itu dapat sesuai dengan apa yang diinginkan. Pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan artinya harus melibatkan semua komponen yaitu dari pihak masyarakat dan pemerintah, dan harus langsung secara terus menerus demi tercapainya kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

### 3. Bentuk Pembangunan

Secara umum pembangunan desa berbentuk pembangunan fisik dan pembangunan non fisik atau mental spiritual. Pembangunan fisik dapat berupa pembangunan sarana dan prasarana, misalnya : jembatan, gorong – gorong, kebun percontohan, MCK, sarana ibadah, dan lain – lain. Sedangkan pembangunan non fisik berupa pemberian kursus, penyuluhan tentang kesehatan, kewirausahaan, penyuluhan tentang hidup sehat dan lain – lain.

### 4. Jenis Pembangunan

#### a. Pembangunan Partisipatif

Partisipasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan ( Oakley, 2012:14). Menurut Bintoro Tjokromidjojo (2001: 223-225) ciri-ciri pembangunan partisipatif adalah :

1. Terlibatnya dan ikut sertanya masyarakat sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara, turut menentukan arah, strategi, dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
2. Meningkatnya kemampuan untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu.
3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi, dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik
4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang terencana.

Menurut parwoto (2014:103) ciri-ciri pembangunan yang partisipatif adalah:

1. Proaktif atau sukarela (tanpa disuruh)
2. Adanya kesepakatan yang diambil bersama oleh semua pihak yang terlibat
3. Adanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut
4. Adanya pembagian kewenangan dan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsur/pihak yang terlibat.

#### b. Pembangunan Non Partisipatif

Menurut Kartasmita (2013:19) pembangunan non partisipatif dapat terjadi sebab

- a. Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil masyarakat dan tidak menguntungkan rakyat banyak
- b. Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat, tetapi banyak yang kurang memahami maksud itu
- c. Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat tetapi rakyat tidak diikutsertakan
- d. Pembangunan dimaksudkan untuk mennguntungkan rakyat dan rakyat memahami, tetapi cara pelaksanakannya tidak sesuai dengan pemahaman tersebut.

Menurut Conyers (1991:154) menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan yaitu:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
3. Kepercayaan semacam ini adalah penting khususnya bila mempunyai tujuan agar dapat diterima oleh masyarakat.
4. Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan mereka pun mempunyai hak untuk turut (memberikan saran) dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan non partisipatif adalah pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam hal ini keputusan yang dimaksud adalah keputusan dalam menentukan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa.

Tidak adanya partisipasi atau peran serta dari masyarakat, maka program-program pembangunan yang akan dijalankan tidak dapat terealisasi dengan baik. Sehingga dalam desa tersebut tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik.

### **E. Kerangka pikir**

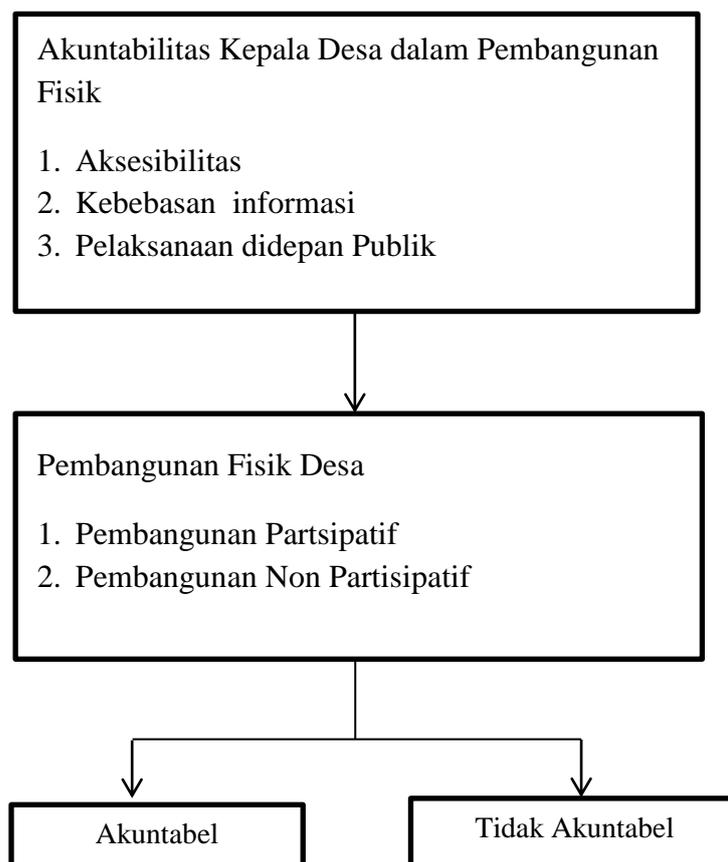
Pembangunan desa tidak terlepas dari peran masyarakat desa. Masyarakat desa akan lebih mengetahui pembangunan apa yang diperlukan oleh desa tersebut. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi yang lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa.

Menurut coghill (2004:89) dalam sistem yang seperti inilah akuntabilitas publik secara garis besar dijalankan, baik dalam pendelegasian kewenangan, pertanggungjawaban, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem akuntabilitas kompleks ini, akuntabilitas publik memiliki berbagai dimensi diantaranya adalah dimensi aksesibilitas, kebebasan informasi dan pelaksanaan di depan publik. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebebasan informasi dan pelaksanaan di depan publik sangatlah penting untuk masyarakat karena bila pemerintah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, masyarakat dapat mengetahuinya dan mengambil tindakan yang sesuai.

Akuntabilitas Kepala Desa Sribhawono dalam Pembangunan Fisik Desa dapat diukur dengan beberapa indikator diantaranya adalah aksesibilitas, kebebasan informasi, dan pelaksanaan di depan publik. Indikator-indikator ini dipilih karena paling sesuai dan dapat berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai akuntabilitas Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa Sribhawono.

Setelah dinilai dari berbagai hal tersebut, maka akan terlihat bagaimana Akuntabilitas Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur. Melalui indikator tersebut dapat kita ketahui apakah Akuntabilitas Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik sudah optimal atau belum.. Masyarakat juga dapat melihat apakah pembangunan Fisik sudah sesuai apa yang mereka harapkan dan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Menurut Nazir (2008: 63) yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Berdasarkan pendapat tersebut, maka penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara terperinci bagaimana sifat serta hubungan antara fenomena sosial tertentu. Tidak terlepas dari pokok permasalahan dalam penelitian, maka tujuan dilakukannya penelitian deskripsi ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana akuntabilitas Kepala Desa dalam pembangunan fisik desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Maleong dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara menyeluruh dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Maleong, 2000:6 )

Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dikarenakan sependapat dengan Bogdan dan Taylor dalam buku Hadari Nawawi yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia menyatakan bahwa pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan orang-orang yang perilakunya yang dapat diamati ( Bogdan dan Taylor dalam Hadari Nawawi, 1994:49 ). Berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, peneliti mencoba untuk menggambarkan bagaimana akuntabilitas kepala desa dalam pembangunan fisik desa Sribhawono kecamatan Bandar Sribhawono kabupaten Lampung Timur.

## **B. Fokus Penelitian**

Menurut Moleong dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif menjelaskan bahwa Fokus penelitian Dimaksudkan untuk membatasi studi penelitian kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan data yang tidak relevan sehingga tidak perlu dimasukkan dalam penelitian (Maleong 2000: 24). Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data sehingga dalam pembatasan ini peneliti akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian.

Memfokuskan dan membatasi pengumpulan data dapat di pandang kemanfaatannya sebagai reduksi data yang diantisipasi. Ini merupakan bentuk pra analisi yang mengesampingkan variabel-variabel dan memperhatikan lainnya. Dengan adanya pemfokuskan akan menghindari pengumpulan data yang serampangan dan hadirnya data yang melimpah ruah ( Mathew B. Miles dan Huberman 1992:30).

Fokus penelitian dari penulis adalah melihat bagaimana Akuntabilitas Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa Sribhawono. Selain melihat bagaimana Akuntabilitas Kepala Desa penulis juga ingin melihat pendapat masyarakat mengenai manfaat pembangunan jalan yang ada di Desa Sribhawono

Fokus penelitian dari kasus ini adalah :

1. Aksesibilitas

Mensyaratkan adanya hak masyarakat untuk mengakses segala bentuk informasi terhadap kebijakan yang diuat oleg pemerintah terutama yang mempunyai dampak langsung terhadap kehidupan mereka. Bentuk informasinya mulai dari draft kebijakan dan berbagai dokumen pemerintahan khususnya akuntabilitas Kepala Desa dalam pembangunan fisik desa Sribhawono kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur. Indikator aksesibilitas ke dalam akuntabel dan tidak akuntabel.

2. Kebebasan Informasi

Dimensi akuntabilitas publik lainnya adalah kebebasan informasi atas segala bentuk dokumen yang ada dalam pemerintahan. hal ini berkaitan erat dengan dimensi aksesibilitas. Dengan dimensi ini tingkat akuntabilitas

akan meningkat karena para pelaksana pemerintahan menyadari bahwa mereka dimintai pertanggungjawaban langsung atas segala kebijakan dan program yang dilakukan. Masyarakat seharusnya dapat mengetahui seberapa jauh keadilan, kejujuran dan kebenaran telah dilaksanakan oleh pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat khususnya akuntabilitas Kepala Desa dalam pembangunan fisik desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur. Indikator akuntabel dan tidak akuntabel.

### 3. Pelaksanaan di depan Publik

Salah satu wujud transparansi dan keterbukaan adalah pelaksanaan pembuatan keputusan serta implementasinya sedapat mungkin dilaksanakan di depan publik khususnya akuntabilitas kepala Desa dalam pembangunan fisik desa Sribhawono. Indikator pelaksanaan dikategorikan kedalam akuntabel dan tidak akuntabel.

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa yang lokasinya berada di desa Sribhawono kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur dikarenakan pembangunan fisik Desa Sribhawono tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Penyebabnya adalah kurangnya dana yang di berikan pemerintah untuk memperbaiki pembangunan yang ada.

## D. Jenis Data

Menurut Loftland dan Loftland (2004: 47) sumber data utama pada penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti sumber data tertulis. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung penelitian dari lapangan (Loftland Dalam Moleong, 2004: 156). Data primer yang digunakan adalah yang berasal dari hasil wawancara. Sumber data dapat ditulis atau direkam, yang akan diwawancarai oleh peneliti berkaitan dengan penelitian ini adalah Kepala Desa Sribhawono, Sekretaris Desa Sribhawono, Bendahara Desa, Ketua BPD dan beberapa tokoh masyarakat sebagai orang yang mengetahui tentang akuntabilitas kepala desa dalam pembangunan fisik Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber tertulis dapat dibagi menjadi sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Adapun yang menjadi sumber tertulis dalam penelitian ini yaitu berupa Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa Sribhawono, Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban ADD Desa Sribhawono, APBDDes Desa Sribhawono.

## E. Penentuan Informan

Teknik pemilihan orang yang akan diwawancarai dilakukan secara purposive sampling. Alasan pemakaian teknik purposive sampling disebabkan oleh peneliti memiliki pertimbangan tertentu untuk memilih informan sesuai kriteria untuk mendapatkan informasi-informasi yang sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan penelitian ini dan jumlah sampel berdasarkan kriteria yang akan diambil oleh peneliti. Adapun yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Desa Sribhawono yang dalam hal ini sebagai pelaksana kebijakan dan pihak yang wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- b. Sekretaris Desa selaku kordinator pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- c. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pembangunan fisik di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.
- d. Ketua BPD, sebagai pihak yang menerima laporan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai pelaksanaan pembangunan fisik di desa akuntabilitas kepala desa dalam pembangunan fisik Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.
- e. Sekretaris BPD, sebagai pihak yang mencatat dan mengorganisir seluruh laporan mengenai pelaksanaan pembangunan fisik di desa akuntabilitas

kepala desa dalam pembangunan fisik Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

- f. Beberapa tokoh masyarakat yaitu satu orang tokoh agama dan satu orang tokoh di kalangan pemuda di desa Sribhawono.
- g. Ketua atau anggota LPM desa Sribhawono.
- i. Tokoh masyarakat desa Sribhawono

Secara keseluruhan jumlah yang akan diwawancarai sebanyak 7 (tujuh) orang. Jumlah ini dianggap sudah cukup mewakili ciri keseluruhan orang-orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pertanggungjawaban Pemerintah Desa yang dimaksud.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara Mendalam (in-depth interview)

Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan dengan jalan mewawancarai sumber-sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada sumber informasi. Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada informan terpilih, pertanyaan yang diajukan pada masing-masing informan sesuai dengan fokus dan masalah penelitian. Mengajukan pertanyaan kepada informan mengenai bagaimana akuntabilitas kepala desa dalam pembangunan fisik desa, untuk mengetahui akuntabel dan tidak akuntabel pelaksanaan pembangunan fisik yang ada di desa Sribhawono.

Wawancara dilakukan pada tanggal 15-19 November 2016 yang dilakukan di desa Sribhawono dengan mewawancarai tujuh informan yaitu di antaranya adalah : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Tokoh Agama, Ketua BPD, dan Tokoh Masyarakat. Wawancara agar mengetahui bagaimana akuntabilitas kepala desa dalam pembangunan fisik Desa Sribhawono kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, wawancara dilakukan kurang lebih 30 menit dengan 10 pertanyaan yang peneliti ajukan kepada setiap informan.

Setelah wawancara membuahkan hasil bahwa Penelitian yang telah dilakukan membuahkan hasil bahwa akuntabilitas kepala Desa Sribhawono tidak akuntabel, karena banyak masyarakat yang tidak diikutsertakan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sehingga terlihat bahwa akuntabilitas kepala desa tidak terlaksanakan dengan baik, dikarenakan pembangunan yang ada di desa Sribhawono merupakan pembangunan non partisipatif. Alasannya adalah pembangunan juga tidak sepenuhnya mengikutsertakan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan maupun pelaksanaannya. Dikatakan tidak akuntabel sebab dengan mengacu tiga indikator yaitu aksesibilitas, kebebasan informasi dan pelaksanaan di depan publik yang belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik. Ketiga indikator tersebut menjadi tolak ukur dalam penelitian ini untuk mengetahui akuntabilitas tidak kepala desa dalam pembangunan fisik khususnya Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

## 2. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis. Dokumen yang dimaksud yaitu berupa Tugas Pokok dan fungsi Kepala Desa Sribhawono, Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban ADD. Dokumen yang berkaitan tentang pertanggungjawaban kepala desa dalam pembangunan fisik desa. Dokumen yang berkaitan dengan pembangunan fisik desa Sribhawono, pertanggungjawaban kepala desa dalam setiap pembangunan, rancangan pembangunan yang ada di Desa Sribhawono.

## 3. Observasi

Observasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan secara sistematis pada obyek penelitian. Pengamatan langsung di lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur. Observasi dilakukan pada tanggal 15-18 November 2016 guna mengetahui pengamatan lebih akurat apakah hasil wawancara selaras dengan kenyataan yang ada di Desa Sribhawono. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang ada di Desa Sribhawono.

Lokasi observasi dilakukan di kantor desa Sribhawono untuk mengetahui kondisi guna memperoleh informasi lebih akurat tentang akuntabilitas kepala desa dalam pembangunan fisik desa.

## **G. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap berikutnya ialah mengolah data tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data sebagaimana yang disebutkan Maleong (1998: 38). adalah:

### **1. Editing**

Yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi maupun dokumentasi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan. Tahap editing yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menyajikan hasil wawancara dan observasi berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dipahami. Hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, tokoh agama, tokoh adan serta masyarakat desa Sribhawono.

Pada kegiatan editing ini peneliti melakukan pengecekan pada setiap hasil penelitian yang telah dibuat, sehingga akan meminimalisir kesalahan yang ada dari hasil penelitian.

### **2. Interpretasi**

Interpretasi merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh di lapangan.

Interpretasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan membuat pembahasan hasil penelitian mengenai akuntabilitas kepala desa dalam pembangunan fisik desa Sribhawono yang dikaitkan dengan model Jaringan Kerja (Sistem Akuntabilitas Kompleks) yang dikembangkan oleh Coghill.

## **H. Teknik Analisis Data**

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Fenomena yang diteliti secara deskriptif tersebut dicari informasi mengenai hal - hal yang dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2007:93) analisis data merupakan proses memanipulasi data hasil penelitian sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian atau proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan.

Menurut Milles dan Huberman (2002:16) terdapat tiga komponen analisis yaitu:

1. Reduksi data

Yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data

mengenai akuntabilitas kepala desa dalam pembangunan fisik desa Sribhawono dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data terasa sesudah penelitian di lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Pada pengumpulan data terjadilah tahapan reduksi selanjutnya yaitu membuat ringkasan mengenai penelitian ini. Reduksi data sebagai proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan.

## 2. Penyajian Data (Display data)

Penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif, berbagai jenis matrik, grafik dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu dan mudah diraih. Dalam penelitian ini penyajian data yang akan digunakan adalah bentuk teks naratif yang disertai bagan dan tabel yang isinya berkaitan dengan penelitian ini tentunya. Peneliti melakukan penyajian data baik dalam bentuk tulisan, gambar maupun tabel.

## 3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Berdasarkan permulaan pengumpulan data, penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penelitian yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah

disediakan, mula-mula belum jelas, kemudian lebih rinci dan mengakar dengan kokoh dan kesimpulan akhir mungkin muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan, pengodeannya, penyimpanan, metode pencairan ulang yang digunakan dan kecakapan peneliti.

Peneliti melakukan verifikasi yaitu melakukan pengumpulan data-data mengenai akuntabilitas kepala Desa dalam pembangunan fisik desa Sribhawono kemudian membuat kesimpulan, kesimpulan awal mula-mula mungkin belum jelas namun setelah itu akan semakin rinci dan mengakar dengan kokoh.

### **I. Uji Triangulasi Data**

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004:330)

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif. 40

Denzin (dalam Moloeng, 2004), membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton,1987:331). Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. Model triangulasi diajukan untuk menghilangkan dikotomi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif sehingga benar-benar ditemukan teori yang tepat. Murti B., 2006 menyatakan bahwa tujuan umum

dilakukan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari sebuah riset.

Dengan demikian triangulasi memiliki arti penting dalam menjembatani dikotomi riset kualitatif dan kuantitatif, sedangkan menurut Yin R.K, 2003 menyatakan bahwa pengumpulan data triangulasi (triangulation) melibatkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Ulber Silalahi, 2009: 340).

Penyajian data yang sering digunakan untuk data kualitatif pada masa yang lalu adalah dalam bentuk teks naratif dalam puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan halaman. Akan tetapi, teks naratif dalam jumlah yang besar melebihi beban kemampuan manusia dalam memproses informasi. Manusia tidak cukup mampu memproses informasi yang besar jumlahnya; kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.

Penyajian data dalam kualitatif sekarang ini juga dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu padan dan mudah diraih. Jadi, penyajian data merupakan bagian dari analisis.

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **A. Sejarah Singkat Desa Sribhawono**

Desa Sribhawono diresmikan pada hari rabu tanggal 3 september 1952 oleh 200 Kepala Keluarga Eks Pejuang Kemerdekan lampung Tengah melalui Biro Rekontruksi Nasional (BRN) dengan susunan struktur organisasinya adalah sebagai berikut:

1. Pelindung Camat Labuhan Maringgai
2. Ketua Umum Bapak Suro Winoto
3. Ketua I Bapak Ruslim Mangku Projo
4. Ketua II Bapak Dulsyayid
5. Sekretaris Bapak Damiri
6. Bendahara Bapak Sarman
7. Konsumsi Bapak Diran
8. Keamanan Bapak Ibrahim
9. Humas Keagamaan Bapak H. Embeng Usuf

Dari 200 KK yang membuka hutan belantara itu membentuk suatu organisasi yang bernama “PRAJA” singkatan dari Prajurit Kerja, untuk menciptakan desa yang mempunyai landasan “RUKUN-AMAN-TERATUR-MAKMUR dan ADIL” .

Pada tahun 1954 suatu kehormatan bagi desa Sribhawono bahwa bapak Doktor Muhammad Hatta yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden, bapak Doktor Muhammad Isa, dan Bapak Gely Harun, SH dan Beliau berkenan untuk :

1. Dr. Muhammad Hatta berkenan menanam pohon beringin di depan alun-alun.
2. Dr. Muhammad Isa berkenan menanam Kepala Kerbau sebagai tumbal desa.
3. Residen Gily Harun, SH berkenan mencangkul tanah yang sekarang menjadi lapangan ditengah-tengah pusat desa.

Pada tahun 1956 Desa Sribhawono diresmikan menjadi desa yang denitif dibawah pemerintahan Kecamatan Labuhan Maringgai dengan diberi nama “SRIBHAWONO” yang bearti SRI artinya Padi/Pangan, BHAWONO artinya Jagad/Hutan dalam arti yang sebenarnya bahwa SRIBHAWONO adalah Lumbungnya/ Lumbungnya Pangan.

Batas-batas Desanya adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Raja Basa Baru
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mataram Baru
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wana
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Larangan

Pada setiap tanggal 3 september Desa Sribhawono diperingati oleh seluruh masyarakat untuk mengenang sejarah berdirinya, yang dirayakan dengan berbagai kegiatan kemasyarakatan, sosial olahraga, keagamaan, secara khidmat dan ziarah ke makam perintis yang telah gugur.

Pada tahun 1969 Presiden Republik Indonesia Soeharto berkunjung ke Desa Sribhawono untuk meresmikan Proyek PT. Mitsugoro ( kerjasama antara Mitsui dari Jepang dan Kosgoro dari Indonesia) turut dalam rombongan:

1. Tien Soeharto
2. Alamsyah Ratu Perwira Negara (Sekneg saat itu)
3. Jendral M. Pangabean
4. Jendral M. Sarbini
5. Sri Sultan Hamengkubuwono IX
6. Sri Paku Alam
7. Jendral Isman
8. Jendral Sudharto
9. Martono
10. Dan para pejabat tinggi negara lainnya baik dari pusat maupun daerah tingkat I.

Pada Tahun 1987 atas dasar keputusan Lembaga atas dasar kepurusan Lembaga Musyawarah Desa Sribhawono dimekarkan menjadi :

1. Sribhawono Utara menjadi Desa Srimenanti
2. Sribhawono barat menjadi Desa Sripendowo

### 3. Sribhawono Selatan menjadi Desa Waringin Jaya

Kepala desa yang pernah menjabat hasil pemilihan Kepala Desa di Sribhawono antara lain:

1. Ibrahim tahun 1956 s.d 1970
2. Siswantoro tahun 1970 s.d 1977
3. Muslim Toto tahun 1980 s.d 1998 ( dua periode)
4. Sujarwo tahun 1999 s.d saat ini (dua periode)

## B. Keadaan Umum Wilayah Desa Sribhawono

### 1. Luas wilayah Desa Sribhawono

Dalam monografi tahun 2015, luas tanah Desa Sribhawono adalah 731,21 Ha, dengan ketinggian 50-200 M diatas permukaan laut. Dengan luas lahan pertanian 293,75 Ha yang berupa perladangan yang luasnya 206,54 Ha dan perkebunan 87,21 Ha. Adapun batas-batas wilayah desa Sribhawono dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2. Batas Wilayah Desa Sribhawono**

No	Batas Wilayah	Nama Teman Berbatas
1	Utara	Desa Srimenanti
2	Timur	Desa Mataram Baru Kec. Mataram Baru
3	Selatan	Desa Waringin Jaya dan Desa Wana Kec. Melinting
4	Barat	Desa Sripendowo

**Sumber: Demografi Desa Sripendowo Tahun 2015**

## 2. Iklim

Iklim Desa Sribhawono sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap pola tanam yang ada di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kanupaten Lampung Timur. Curah hujan rata-rata 2000-3000 mdl dan suhu rata-rata 20-30°C.

## C. Keadaan Penduduk Desa Sribhawono

### 1. Keadaan Umum Penduduk

Jumlah penduduk Desa Sribhawono pada tahun 2015 adalah 8430 jiwa yang terdiri dari 4310 jiwa laki-laki dan 4120 jiwa perempuan dan jumlah krpala keluarga 2.356 KK.

### 2. Keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat desa Sribhawono adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Jumlah Pendidikan penduduk Desa Sribhawono**

NO	Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah
1	Tidak tamat SD/ belum tamat	2471 orang
2	Sekolah Dasar	1.903 Orang
3	Sekolah Menengah Pertama	2.237 Orang
4	Sekolah Menengah Atas	1.732 Orang
5	Diploma/ Sarjana	86 Orang

**Sumber: Monografi Desa Sribhawono Tahun 2015**

### 3. Keadaan penduduk berdasarkan agama

Penduduk Desa Sribhawono menganut beragam agam yang terdiri dari 5 agama yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4. Jumlah Penduduk berdasarkan Agama**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	8.398 Orang
2	Kristen Protestan	48 Orang
3	Katolik	19 Orang
4	Hindu	3 Orang
5	Budha	6 Orang

**Sumber: Demografi Desa Sribhawono tahun 2015**

Dari keterangan diatas, menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Sribhawono yaitu menganut agama islam, selain itu menganut agama kristen, agama katolik, agama hindu dan agama Budha.

### 4. Keadaan Penduduk berdasarkan golongan umur

Keadaan penduduk Desa Sribhawono berdasarkan golongan umur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5. Jumlah penduduk berdasarkan Golongan Umur**

No	Golongan Umur	Jumlah
1	0-15 tahun	2.009 Orang
2	16-55 tahun	5.420 Orang
3	Diatas 55 tahun	1.045 Orang

**Sumber: Rencana pembangunan Desa tahun 2015**

Berdasarkan tabel diatas jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, produktif dan lansia adalah sebagai berikut ; 23% : 63% : 14%. Dari 8429 jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama atau seimbang.

## 5. Keadaan penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

**Tabel 6. Keadaan Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Buruh tani	458 Orang
2	Petani	830 Orang
3	Peternak	46 Orang
4	Pedagang	409 Orang
5	Tukang Kayu	180 Orang
6	Tukang Batu	125 Orang
7	Penjahit	11 Orang
8	PNS	152 Orang
9	Pensiunan	17 Orang
10	TNI/Polri	11 Orang
11	Perangkat Desa	20 Orang
12	Pengrajin	10 Orang
13	Industri Kecil	24 Orang
14	Buruh Industri	40 Orang

**Sumber: Rencana Kegiatan Pembangunan Desa tahun 2015**

Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah buruh tani dan petani. Hal ini disebabkan karena turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga karena minimnya tingkat pendidikan menyebabkan

masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi buruh tani dan buruh bangunan.

## 6. Sarana dan Prasarana Desa Sribhawono

Tabel 7. Sarana dan prasarana Desa sribhawono

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kantor Desa	1
2	Gedung SLTA	5
3	Gedung SLTP/Mts	4
4	Gedung SD	3
5	Gedung MI	1
6	Gedung TK	4
7	Masjid	7
8	Musholla	25
9	Puskemas	1
10	Rumah Sakit	1
11	Poliklinik	2
12	Poskamling	26
13	Jembatan	10
14	Gedung TPQ	1

**Sumber: Rencana Kegiatan Pembangunan Desa tahun 2015**

Dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Sribhawono sudah menjadi Desa pendidikan di wilayah Lampung Timur Khususnya wilayah bagian tenggara kabupaten. Desa sribhawono tidak memiliki pasar desa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat biasanya datang kepasar tradisional yang ada di Desa Srimenanti. Secara umum sarana dan prasarana yang ada di desa sudah cukup lengkap.

#### D. Struktur Pemerintah Desa Sribhawono

Jumlah pegawai dari Kepala Desa sampai dengan Kepala dusun berjumlah 20 orang sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Sujarwo	Kepala Desa
2	Bambang Purwosaputro	Sekretaris Desa
3	Margito	Kaur Pemerintahan
4	Rasam	Kaur Pembangunan
5	Iswandi	Kaur Keuangan
6	Isman	Kaur umum
7	Supriyanto	Kasi Tehnis Pertanian
8	Sutiyono	Kasi Tehnis Keamanan
9	Debi Yuliana	Kadus I
10	Darsono	Kadus II
11	Jumadi	Kadus III
12	Triono	Kadus IV
13	Pujo Wardoyo	Kadus V
14	Candra Kartika	Kadus VI
15	Suratmono	Kadus VII
16	Deni Pardiono	Kadus VIII
17	Zaenal Abidin	Kadus IX
18	Sajidin	Kadus X
19	Suwarjono	Kadus XI
20	Hendri Susilo	Kadus XII

**Sumber : Laporan Penyelenggaraan desa akhir tahun 2015**

## **E. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Sribhawono**

### **1. Kepala Desa**

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa
- c. Menetapkan peraturan desa/desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa/desa mengenai ADD untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- g. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kepala Desa mempunyai kewajiban dalam melaksanakan tugas dan wewenang:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;

- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat dan desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat:
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

## **2. Sekretaris Desa**

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur staff yang membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta memimpin sekretariat desa. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekretariat desa dibantu oleh kepala urusan staff seperti kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan umum.

Tugas pokok dan fungsi Sekretaris Desa sebagai berikut:

- a. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan,
- b. Pelaksanaan urusan surat-surat, kearsipan dan laporan
- c. Pelaksanaan administrasi umum
- d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,
- e. Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja pelaksanaan tugas sekretariat
- f. Menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa
- g. Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan, dan peralatan keamanan dan kebersihan kantor
- h. Menyusun dan memproses rancangan hukum desa
- i. Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaannya
- j. Menyusun program tahunan desa ( RPJMDes dan RKPDes)

### **3. Bendahara**

Bendahara mempunyai tugas untuk membantu kepala desa dalam mengelola administrasi dibidang keuangan desa, segala pendapatan dan kekayaan desa, mengelola APBD, membuat laporan keuangan desa yang bersumber dari pendapatan desa baik dari pendapatan dana dari pusat maupun dana dari kabupaten.

## F. Gambaran Umum Pembangunan fisik Sribhawono

Pembangunan yang ada di desa Sribhawono sejauh ini masih banyak yang harus diperbaiki dan dibenahi oleh pemerintah desa setempat. Dalam penyusunan peraturan pembangunan desa setiap tahunnya yang dana bantuan dari pemerintah maupun swadaya masyarakat telah melakukan sesuai dengan tahapan yaitu melalui kegiatan musrenbang serta selanjutnya diusulkan kepada pemerintah kabupaten melalui camat.

Pembangunan sejauh ini yang sudah dilakukan di desa sribhawono adalah pembangunan gedung TK pertiwi, pembangunan jalan onderlagh, pembangunan drainase, jembatan dan Peningkatan Jalan latasir. Pembangunan tersebut bersumber dari dan pemerintah pusat dan provinsi. Seperti tertera pada tabel berikut:

No	Jenis Pembangunan	Jumlah
1	Pembangunan Onderlagh	1000 M
2	Pembangunan Jalan Latasir	1000 M
3	Pembangunan Drainase	586 M
4	Gedung TK Pertiwi	1 Unit

Sumber :Laporan Peranggungjawaban Pelaksanaan APBDes

Sesuai dengan program kerja desa yang diatur dalam Anggaran Belanja Desa tahun 2015 bahwa dalam rangka melaksanakan tugas layanan kepada masyarakat sesuai peraturan desa, petunjuk dan hasil pemerintah

daerah kabupaten Lampung Timur. Pelaksanaan bantuan pemerintah yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa untuk pembangunan jalan onderlagh sepanjang 1.000 M. Serta pembangunan Drainase sepanjang 586 M.

Pembangunan fisik sangat berarti bagi masyarakat desa terutama pada akses jalan raya. Pembangunan jalan yang baik akan memperlancar kegiatan yang dilakukan masyarakat. Kegiatan sehari-hari tidak akan terganggu dengan prasarana yang baik. Pembangunan akan terwujud apabila terdapat pertanggungjawaban dari kepala desa mengenai pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila pembangunan jalan raya merupakan faktor yang sangat penting sebaiknya pembangunan jalan didahulukan dan di prioritaskan.

Pembangunan-pembangunann yang dilakukan di desa Sribhawono merupakan pembangunan yang dana berasal dari dana desa seperti pembangunan onderlagh sepanjang 1000 meter dengan anggaran sebesar 197.008.160 namun hanya terrealisasi sebesar 176.008.160. biaya tersebut termasuk biaya tukang, dan kebutuhan bahan bangunan lain. Sisa dari dana tersebut diswadaakan untuk membangun gorong-gorong, seharusnya lebih baik digunakan untuk memperkuat saluran drainase agar tidak mudah rusak.

Pembangunann drainase desa Sribhawono yang terletak di beberapa dusun memilikidana biaya sekitar 486.275.000,dengan biaya tersebut dapat membuat drainase sepanjang 586 M .

Pembangunan fisik lain yang dibangun yaitu pembangunan gedung TK Pertiwi dengan ukuran 6,5 m x 13 m seluas 84,5 m yang terletak di dusun VI lingkungan balai Desa Sribhawono yang dana tersebut diberikan dari ADD sebesar Rp.79.333.00 dan pembangunan jalan Latasir pada beberapa dusun.

Pembangunan jalan latasir dapat terbangun sepanjang 1000 meter selain itu desa Sribhawono juga membangun gorong-gorong sebanyak dua buah serta pembangunan jalan talford sepanjang 3m x 220 m di dusun XI.

Beberapa pembangunan fisik tersebut merupakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa Sribhawono, walau masih banyak pembangunan yang harus diperbaiki agar masyarakat desa Sribhawono merasa nyaman serta dapat mendukung kegiatan sehari-hari.

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mengajukan simpulan bahwa akuntabilitas kepala desa dalam pembangunan fisik Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur tidak akuntabel. Hal ini disebabkan oleh:

1. Pemerintah Sribhawono kurang terbuka kepada masyarakat dan hanya menerima segelintir pendapat dari beberapa warga masyarakat, sehingga pembangunan hanya menguntungkan beberapa pihak tertentu saja.
2. Pembangunan masih kurang tepat dilakukan aparat pemerintah Desa Sribhawono lakukan, sebab pembangunan yang dilaksanakan kurang dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Pelaksanaan di depan publik masih rendah, sebab masyarakat hanya menerima sebagian informasi dan tanpa disertai dengan data yang akurat.

## **B. Saran**

Atas dasar simpulan di atas, maka saran peneliti ajukan adalah:

1. Pemerintah Desa Sribhawono sebaiknya memberikan akses seluas-luasnya untuk masyarakat memberikan kritik dan saran agar pembangunan yang dilakukan akan sesuai apa yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat yang ada di Desa Sribhawono.
2. Pemerintah desa lebih melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan yang ada di desa. Pemerintah desa mengadakan musyawarah anatar aparat desa dengan masyarakat desa untuk merumuskan kebijakan pembangunan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pembangunan yang tepat akan terjadi apabila pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Pemerintah Desa memberikan rincian pembangunan yang sedetail mungkin kepada masyarakat agar pertanggung jawaban yang dilakukan oleh kepala desa diketahui masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui apakah kinerja aparat desa telah sesuai untuk menjadikan pembangunan desa menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Afriyadi, Teguh. 2004. *Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Creswell, Jhon W. 1994. *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. California: sage Publication.
- Conyers.1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Ellwood.2003. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di daerah*. Jakarta: Bima Aksara
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2008. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Ginanjart Kartasasmita. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Berakar pada Masyarakat*. Jakarta: Bappenas.
- Halim, Abdul.2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Kansil, CST. 1990. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Ken, Coghill. 2004. *Administrasi Perkantoran Modern*.Yogyakarta: Nurcahya.
- Kumorotomo, W.2006. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Loftland dan Loftland, 2004. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta. Bima Aksara
- Matew Milles dan Huberman. 2002. *Dasar Dasar Organisasi*. UGM. Press. Yogyakarta
- Moh, Nazir.2008. *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung. Jakarta

- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja dkk. Bandung
- Moloeng, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- Oakley.1991. *definisi Konseptual, Operasional, Dimensi dan Indikator Kontribusi*. Jakarta. Salemba Empat
- Patton, Michael Quinn. 1987.*Metode Evaluasi Kualitatif* , Terjemah: Budi Puspo Priyadi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Polindano, 1998. *Pola-Pola Kepemimpinan Dalam Pemerintahan*. Ceramah pada Coaching Mnagement Lembaga Pertahanan Nasional, 2002.
- Purwanto, Diyah. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung : Alfabeta.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Saragih, Bungaran. 2008. *Mengembangkan Keswadayaan Masyarakat di daerah pedesaan*. Jakarta. LP3ES
- Sirajudin H. Saleh dan Aslam Iqbal, 2008. *Perencanaan Pembangunan Pedesaan*, Gunung Agung, Jakarta
- Soemantri, Trsantono Bambang. 2010. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta. Fokusmedia
- Suryaningrat, Bayu. 2009. *Pemerintahan dan Administrasi Desa*. Bandung: Mekar Jaya.
- Tjokroamidjojo, Bintoro.2001. *Good Governance ( Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*. Jakarta : UI Press.
- Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Widjaja,HAW.2003.*Otonomi Desa*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance*. Surabaya: Insan Cendekia

Yin, Robert K. 2003. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta. Rajawali Press

**Dokumen :**

Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang *Pemerintah Desa*

**Media :**

(<http://m.lampost.co/read.php?link=dana-desa-lampung-diprioritaskan-pembangunan-fisik> diakses 7 januari 2016)

(<http://www.scribd.com/doc/143223863/akuntabilitas-pemerintah-desa-dalam-pengelolaan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-desa-apbdes-studi-pada-alokasi-dana-desa-tahun-anggaran-2011-di-des#scribd> di akses pada 7 januari 2016)

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53f9cbe50ea6f/dana-desa-dikucurkan-secara-bertahap> diakses 27 januari 2016 )